



Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Studi Kasus LLDIKTI Wilayah I Sumut

Ainun Nahya Dwi Arizona, Juliana

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
ainunnahyadwiarizona@gmail.com, julianansution@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Public sector organizations are required to pay attention to Value for Money in carrying out their activities. The desired objective is to include accountability regarding the implementation of value for money, namely the economy in procurement and efficient resource allocation in the use of resources in the sense that their use is minimized and the results are maximized and effective in the sense of achieving goals and objectives. This research is the result of observations that show the facts and explain the nature that occurs in the object under study. This study aims to determine and analyze the effectiveness and efficiency of the LLDIKTI Region I North Sumatra Medan expenditure budget for the 2018-2021 period. In this study, it can be seen whether the implementation of the LLDIKTI Regional I North Sumatra Medan budget has been effective and efficient in it. The type of research used in this research is descriptive research using a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of observation and literature study. The theory used to determine and analyze the effectiveness and efficiency of budget implementation is the analysis and calculation of the level of effectiveness and efficiency. Based on the results of this study, it shows the level or criteria for budget effectiveness at LLDIKTI Region I North Sumatra Medan from 2018-2021. In its implementation, the 2018-2021 budget as a whole is effective. And in 2018, 2019 and, 2021 was included in the fairly efficient category, while in 2020 there was an increase so that it was included in the efficient category.

Keywords : Effectiveness, Efficiency, Budget, LLDIKTI Regional I

Pendahuluan

Peran akuntansi sebagai alat pencatatan semakin diperlukan akibat tuntutan reformasi yang semakin melonjak pada era globalisasi. Kepentingan ini tidak hanya di tujukan pada pengelolaan suatu entitas, tetapi juga kebutuhan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang membutuhkan. Berkembang sejajar dengan evolusi dunia pemerintahan. Lembaga pemerintah merupakan organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Instansi pemerintah biasanya diciptakan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, tujuan pemerintah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi hanya memberikan pelayanan. Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menyelenggarakan suatu kegiatan, pengaturan, pengarahan, dan koordinasi pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan fenomena penyelenggaraan, secara baik dan benar.

Perguruan Tinggi Wilayah I merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan (WASDALBIN) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bidang kegiatannya berdasarkan kebijakan Direktur Sekolah Diklat Jenderal Pendidikan tinggi. Anggaran memegang peranan yang begitu penting dalam suatu lembaga/instansi atau perusahaan. Anggaran merupakan sebuah alat yang mempunyai pengaruh besar terhadap perencanaan dan pengendalian daerah terhadap organisasi pemerintahan karena sangat bergantung pada besarnya anggaran yang direalisasikan atau disediakan oleh pemerintah, sehingga mampu memungkinkan tercapainya pencapaian ekonomi, efektifitas dan efisiensi. Uang penyelenggaraan pemerintahan serta tujuan penyelenggaraan pemerintahan setiap organisasi atau instansi dapat dilaksanakan.

Bagi sebuah instansi pemerintah bahwa menyusun anggaran merupakan langkah penting termasuk membantu pelaksanaan dalam menentukan kebijakan program dengan memberikan besarnya gambaran dana yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan program tersebut gunanya untuk meminimalkan biaya penyimpangan. anggaran dan pendanaan pelaksanaan kegiatan instansi selama satu tahun dan ditinjau langsung dari berapa besarnya pemasukan biaya anggaran dengan pencapaian yang dinyatakan dalam nominal atau persentase. Efektivitas anggaran merupakan hal yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah dianggap baik apabila pemerintah dapat melakukan efektivitas belanja dan mampu mengidentifikasi anggaran sehingga anggaran dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan. Pemasalah efektifitas pengelolaan anggaran dapat dianggap sebagai masalah produksi maksimum melalui input tertentu yang telah ditentukan. Masalah efisiensi pengelolaan anggaran dapat dianggap sebagai persoalan keluaran maksimum melalui masukan tertentu yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja sangat penting untuk dilakukan karena merupakan sebuah alat untuk memperoleh informasi dalam rangka penilaian anggaran pada instansi pemerintah. Maka, untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penilaian kinerja keuangan menjadi sangat penting karena jika realisasi anggaran tidak efektif akan mempengaruhi kemajuan instansi. Sehingga perlu diadakannya pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran agar tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Permasalahan yang terjadi adalah pada laporan realisasi anggaran LLDIKTI Regional I Sumut Tahun Anggaran 2018-2021 yaitu terdapat permasalahan pada tahap pelaksanaan anggaran belanja langsung dengan rincian program kegiatan yang telah dilakukan terkait terhadap tujuan dan pencapaian yang d belum efektif akibat fluktuasi anggaran dan kegagalan pelaksanaan untuk mencapai tujuan anggaran di LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.

Kajian Teori

Pengertian Akuntansi

Menurut (Lasupu, 2021) “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang terdiri dari pencatatan, penggolongan, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan”. Dan menurut (Muhammad Rizqi Saifuddiin & Wiyono, 2021) “Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk dapat memungkinkan penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang menggunakan informasi tersebut”.

Akuntansi Sektor Publik

(Sari et al., 2018) “Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terdiri dari pencatatan, klarifikasi, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik pada lembaga tinggi negara dan departemen di bawah”. Standar akuntansi pemerintah memuat prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal berlaku serta ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum.

Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa :

“Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan pelaksanaan anggaran memberikan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dan dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat dan daerah pada periode berikutnya dengan menyajikan laporan perbandingan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pusat. Pelaporan laporan

pelaksanaan anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan pelaksanaannya selama periode pelaporan. (Sari et al., 2018)

Realisasi Anggaran

(Sahala Purba, 2021) Laporan realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Penerimaan LRA Merupakan penerimaan Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) atau instansi pemerintah lainnya yang selanjutnya menambah saldo anggaran selama periode tahun anggaran yang bersangkutan yang merupakan hak pemerintah dan tidak perlu diganti oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan Semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran.
3. Transfer merupakan Jasa pelayanan bank antara penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lain,
4. Penerimaan pinjaman yang tidak mempengaruhi dana entitas sendiri yang harus diganti dan akan dikembalikan, baik selama tahun acuan maupun tahun berikutnya yang dalam anggaran tahun terutama ditujukan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pendapatan pembiayaan mencakup antara lain pinjaman dan hasil divestasi. Biaya pendanaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Pengertian Efektivitas

(Harry P. Paat, 2019) “Efektivitas merupakan suatu ukuran antara berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut”. Menurut (Dharmawan et al., 2019) “Efektivitas merupakan perbandingan antara target (hasil yang diharapkan) dengan realisasi hasil yang ingin dicapai. Suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dengan kata lain, anggaran telah digunakan secara tepat (*Spending Wisely*)”.

Dimensi efektivitas sebagai berikut :

1. Output
Output (keluaran) adalah sesuatu hasil yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan/input yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan sebuah landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur yang dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.
2. Outcome
Outcome (Hasil) adalah suatu hasil yang terjadi setelah pelaksanaan keluaran yang dapat langsung digunakan, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*) dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.

Rasio Efektivitas

(Muhammad Jarkasih, 2020) Rasio Efektivitas yang digunakan untuk mengetahui persentase tingkat efektivitas harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan membagi realisasi dengan anggaran resmi.

Pengertian Efisiensi

(Harry P. Paat, 2019) “Efisiensi merupakan hubungan antara biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengeluaran kegiatan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumut. Ukuran ini digunakan untuk memperoleh pendapatan tertentu, digunakan sesedikit mungkin karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat efisien yang akan terjadi akan lebih tinggi jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai pendapatan tersebut ditekan serendah mungkin. Sehingga pencapaian peningkatan pendapatan. efisiensi juga melihat upaya untuk mengoptimalkan campuran penggunaan input atau untuk menghasilkan beberapa tingkat output dengan biaya minimum atau kemampuan untuk

menghasilkan output maksimum yang mungkin dari sejumlah entri”. (Pangkey & Pinatik, 2015) “Efisiensi merupakan hubungan antara *output* berupa barang dan jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas, suatu organisasi program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.”

Rasio Efisiensi

menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan membandingkan anggaran belanja dinas dengan realisasinya. (Muhammad Jarkasih, 2020)

Pengertian Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 2 menyatakan bahwa : “Penetapan anggaran merupakan pedoman bagi tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk rencana penerimaan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam rupiah yang disusun menurut ketentuan tertentu. detail secara sistematis selama periode tertentu”. Secara kuantitatif rencana kerja dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan ukuran standard yang serupa dengan lainnya dalam jangka waktu tertentu. Anggaran adalah representasi dari suatu organisasi untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk kebutuhan atau programnya. Anggaran mempunyai beberapa fungsi yang dapat digunakan sebagai sebuah alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan perpajakan, alat kebijakan, alat koordinasi dan komunikasi, alat evaluasi kinerja. Menurut (Lasupu, 2021) “Anggaran sebagai pedoman tindakan yang akan dilakukan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang secara sistematis diklasifikasikan dalam klasifikasi tertentu selama satu periode”. (Lasupu, 2021) menyatakan Persiapan dan pelaksanaan anggaran berlangsung dari waktu ke waktu dan merupakan serangkaian proses yang saling terkait. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu :

- a. Untuk memberikan bantuan kepada organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi lintas departemen dalam pembelajaran.
- b. Membantu terciptanya prinsip efisiensi, efektifitas dan pemerataan dalam penyediaan barang dan jasa public melalui proses yang diprioritaskan.
- c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban manajemen sector public

(Alimuddin & Damis, 2018) “Anggaran dapat dilihat sebagai pernyataan mengenai perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam metrik keuangan. Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial”.

a. Tujuan Anggaran

1. Digunakan sebagai dasar hukum formal untuk memilih sumber dan investasi dana
2. Menetapkan batasan jumlah dana yang diminta dan digunakan.
3. Merinci jenis sumber pembiayaan yang dicari dan jenis dana investasi untuk memudahkan pengawasan.
4. Merasionalkan sumber dan investasi dana untuk hasil yang maksimal
5. Menyelesaikan rencana yang telah disusun agar anggaran menjadi lebih jelas dan terlihat.
6. Menerima, menganalisis dan memutuskan setiap proposal yang berkaitan dengan pembiayaan.

b. Manfaat Anggaran

1. Semua kegiatan dapat bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kekuatan dan kelemahan pegawai
3. Dapat memotivasi pegawai
4. Menciptakan rasa tanggung jawab pada pegawai
5. Hindari pemborosan dan pembayaran yang tidak perlu, dan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat digunakan seefisien mungkin.

Anggaran sektor Publik

(Akuntansi & Ekonomi, 2016) “Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan keuangan dari perkiraan pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan data yang diperoleh dari masa lalu sebagai tolak ukur anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan proses politik karena dalam sektor publik anggaran harus dikomunikasikan kepada public untuk dikritik, diskusi dan masukan. Penggunaan anggaran negara sebagai alat pemandu untuk perencanaan dan pengendalian sumber daya, keuangan maupun lainnya”. (Lasupu, 2021) “Anggaran pemerintah adalah dokumen formal yang dihasilkan dari kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai pengeluaran yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan jika diharapkan defisit atau surplus”.

Menurut (Siska & Afriyanto, 2018) Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu

1. Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan suatu pengelolaan negara. Pengeluaran public yang dapat digolongkan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin.
2. Anggaran Modal menunjukkan rencana dan pengeluaran jangka panjang untuk aset tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, furniture, dll. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan melalui pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan meningkatkan aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya meningkatkan anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Belanja

(Prasetyo & Nugraheni, 2020) “Belanja merupakan semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran untuk suatu periode yang lebih besar dari periode pelaporan yang tidak akan diperoleh penggantian dari bendahara umum daerah dan bendahara umum negara. Belanja daerah adalah belanja pemerintah yang berupa belanja langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan program-program public. Beban tersebut terdiri dari beban pegawai, beban peralatan, dan beban lain-lain. untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan”.

Pengertian Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Anggaran Belanja Langsung

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, “Pengertian belanja langsung yaitu belanja yang berkaitan dengan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan. Jenis-jenis belanja langsung yang dilaksanakan oleh permendagri No. 13 Tahun 2006.” yaitu :

- a. Belanja Pegawai, belanja ini merupakan pengeluaran untuk membayar gaji atau upah pegawai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Belanja Barang dan Jasa Pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa dengan nilai kegunaan kurang dari 12 bulan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan program pemerintah daerah.
- c. Belanja Modal ini digunakan untuk membeli atau membangun aset tetap berwujud dengan nilai kegunaan melebihi 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah.

Anggaran Belanja Tidak Langsung

(Pangkey & Pinatik, 2015) “Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan”.

Jenis belanja tidak langsung adalah :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial

- f. Belanja Bagi Hasil
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- h. Belanja Tidak Terduga

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada dilapangan dengan melihat kesesuaian berdasarkan fakta dan landasan teori.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLdikti) Wilayah I Sumatera Utara. Pada tanggal 17 Januari-17 Februari 2022. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLdikti) Wilayah I Sumatera Utara. Dan Laporan Realisasi Anggaran belanja Tahun 2018-2021 sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitian ini Sumber data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari LLdikti Wilayah I Sumatera Utara yaitu Rincian Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018-2021, dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Efektifitas dan efisiensi anggaran belanja adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam menyelenggarakan anggaran belanja pada suatu organisasi sektor public. Hal ini bertujuan untuk suatu pelayanan dan kesejahteraan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal.

Pembahasan

Efektivitas Anggaran Belanja

Salah satu indikator yang banyak diminati untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menyerap anggaran adalah efektifitas. Efektifitas berkaitan erat dengan produk atau suatu hasil yang dicapai. Suatu organisasi dikatakan baik jika mampu mencapai atau menyelesaikan sesuatu yang sudah direncanakan atau sebaliknya. Suatu organisasi dikatakan kurang efisien jika tidak mampu mencapai atau menyelesaikan sesuatu yang semula direncanakan. Pengukuran tingkat efisiensi organisasi dalam penyerapan anggaran dapat dilakukan dengan cara membagi pencapaian belanja dengan target belanja kemudian dikalikan 100% yang akan menentukan efisiensi organisasi dalam penyerapan anggaran.

Dalam menghitung tingkat efektivitas penulis perlu menghitung target anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja langsung yang dihitung dengan rumus tingkat efektivitas yang hasil dikelompokkan ke dalam kriteria menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran Belanja}{Target Anggaran Belanja} \times 100\%$$

Tabel 4.1

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Tabel 4.2

**Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018-2021
LLDIKTI Wilayah I Sumut**

No.	Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja
1.	2018	Rp 164.442.723.925	Rp 162.993.110.292
2.	2019	Rp 186.612.992.000	Rp 183.163.812.309
3.	2020	Rp 216.334.714.000	Rp 205.641.959.298
4.	2021	Rp 225.376.100.000	Rp 217.698.629.382

Perhitungan Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja LLDIKTI Wilayah I Sumut Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp 162.993.110.292}}{\text{Rp 164.442.723.925}} \times 100\% = 94,11\% \\ \text{Efektivitas Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp 183.163.812.309}}{\text{Rp 186.612.992.000}} \times 100\% = 98,15\% \\ \text{Efektivitas Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp 212.728.218.276}}{\text{Rp 216.334.714.000}} \times 100\% = 98,33\% \\ \text{Efektivitas Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp 218.223.721.297}}{\text{Rp 225.376.100.000}} \times 100\% = 96,82\% \end{aligned}$$

Tabel 4.3
Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2018	Rp 164.442.723.925	Rp 162.993.110.292	94,11%	Efektif
2019	Rp 186.612.992.000	Rp 183.163.812.309	98,15%	Efektif
2020	Rp 216.334.714.000	Rp 212.728.218.276	98,33%	Efektif
2021	Rp 225.376.100.000	Rp 218.223.721.297	96,82%	Efektif

Pada tahun 2018 memperoleh tingkat efektivitas sebesar 94,11% menunjukkan kategori efektif karena melebihi 90%. Pada tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan dengan tercapainya nilai sebesar 98,15% dari target anggaran. Hal ini menunjukkan tingkat efektifitas berada pada kategori efektif, begitu juga pada tahun 2020 terjadinya peningkatan sebesar 98,33%, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 96,82% namun masih tergolong kategori efektif.

Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Efisiensi juga merupakan suatu indikator yang dapat mengukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menyerap suatu anggaran. Efisiensi berkaitan dengan efektivitas. Efisiensi erat kaitannya dengan produktivitas suatu organisasi. Suatu organisasi dikatakan efisien jika hasil dapat dicapai secara minimal. Suatu organisasi dikatakan efektif jika hasil yang dicapai tidak melebihi tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan input yang sama. Estimasi tingkat efektivitas organisasi dalam menyerap anggaran dapat dilakukan dengan membagi pencapaian belanja langsung dengan total pencapaian anggaran kemudian dikalikan 100%.

Faktor Dibawah ini akan menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja pada LLDIKTI Wilayah I Sumut.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggarean Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Rasio Efisiensi

Rasio Efisien	Kriteria
>100	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Langsung LLDIKTI Wilayah I Sumut Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 132.892.438.767}{\text{Rp } 162.993.110.292} \times 100\% = 81,53\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 150.698.611.000}{\text{Rp } 183.163.812.309} \times 100\% = 82,27\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 154.454.826.456}{\text{Rp } 212.091.560.000} \times 100\% = 72,60\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 177.762.754.000}{\text{Rp } 218.223.721.297} \times 100\% = 81,45\%\end{aligned}$$

Tabel 4.5
Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Tingkat Efisien	Kriteria
2018	Rp 162.993.110.292	Rp 132.892.438.767	81,53%	Cukup Efisien
2019	Rp 183.163.812.309	Rp 150.698.611.000	82,27%	Cukup Efisien
2020	Rp 212.728.218.276	Rp 154.454.826.456	72,60%	Efisien
2021	Rp 218.223.721.297	Rp 177.762.754.000	81,45%	Cukup Efisien

Dapat dilihat pada perhitungan rasio efisiensi tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 81, 53% dikategorikan cukup efisien. Tahun 2019 memperoleh hasil 82,27% dikategorikan cukup efisien. Kemudian pada tahun 2020 mendapatkan hasil sebesar 72,60% dikategorikan efisien. Selanjutnya pada tahun 2021 mendapatkan hasil sebesar 81,45% dikategorikan cukup efisien.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3 terlihat bahwa rata-rata tingkat efektivitas anggaran belanja LLDIKTI Wilayah I Sumut Tahun 2018-2021 sebesar 98% termasuk ke dalam kriteria efektif.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 terlihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi anggaran belanja LLDIKTI Wilayah I Sumut Tahun 2018-2021 sebesar 80% termasuk ke dalam kriteria Cukup Efisien. Hal ini dapat dikatakan bahwa LLDIKTI Wilayah I Sumut sudah cukup dalam mengatur tingkat efisiensi anggaran belanjanya, sehingga sudah cukup meminimalisir pemborosan dan memaksimalkan pengelolaan dalam penggunaan sumber daya (dana).

Saran

Menilai dari segi efektivitas realisasi anggaran belanja sudah sangat baik dilakukan. Sehingga kedepannya untuk tetap mempertahankan tingkat efektivitasnya.

Untuk tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja sudah cukup baik. Namun kedepannya untuk lebih ditingkatkan lagi efisiensinya sehingga mampu mencapai kriteria sangat efisien dengan mempertahankan sumber daya (dana) dan berdasarkan prinsip efisiensi untuk menghindari pemborosan uang negara.

Referensi

- Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 616–623.
- Alimuddin, F., & Damis, H. (2018). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 109–210. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/89>
- Dharmawan, M. Y., Latif, I. N., & Dewi, K. (2019). *Evaluasi Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaTenggarong Tahun 2016-2019)*.
- Harry P. Paat. (2019). 765-Article Text-2056-1-10-20210609. *ANALISIS EFEKTIFITAS DAN*

- EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON*, 7, 2979–2988.
- Lasupu, E. Z. et. a. (2021). 35780-75832-1-SM. *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOJO UNA-UNA*, 9, 1433–1441.
- Muhammad Jarkasih. (2020). 6167-14426-2-PB. *ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*, 1–9.
- Muhammad Rizqi Saifuddiin, K. C. K., & Wiyono, G. (2021). Jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan. *Ilmiah Akunatansi*, 3(2), 146–164.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal EMBA*, 3(4), 33–43.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 1–10.
- Sahala Purba, M. S. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan ANggaran Belanja Tahun 2014-2019 Pada Pemko Tebing Tinggi. *Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*, 02(01), 142–150.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Kinerja*, 15(1), 38. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i1.4051>
- Siska, A. J., & Afriyanto, N. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh). *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.30983/es.v2i1.522>